



## *Community Segmentation Based on Financial Readiness and Perception of Hajj Fund Governance by BPKH*

### **Segmentasi Masyarakat Berdasarkan Kesiapan Finansial dan Persepsi terhadap Tata Kelola Dana Haji oleh BPKH**

Nihlahtuzzahra\*, Agung Sri Hendarsa, Hadiyati Munawaroh<sup>1</sup>, Moch. Bukhori Muslim<sup>2</sup>, M. Dawud Arif Khan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Badan Pengelola Keuangan Haji; <sup>2</sup>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; <sup>3</sup>Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta

Email Correspondence Author:  
[nihlahtuzzahra@bpkh.go.id](mailto:nihlahtuzzahra@bpkh.go.id)

Received: March 20<sup>th</sup>, 2025

Revised: April 11<sup>th</sup> 2025

Accepted: June 12<sup>th</sup>, 2025

#### **Keywords:**

*Hajj Cost; Hajj Fund; Benefit Distribution; Financial; Justice; Public Trust; Governance*

#### **Abstract**

*The increase in the Hajj Pilgrimage Cost (BPIH) has become a crucial issue that affects the financial readiness of the community and raises public questions about transparency and sharia compliance in the management of Hajj funds by the Hajj Financial Management Agency (BPKH). This study aims to analyze the influence of public perceptions of sharia governance by BPKH on their financial readiness in facing the policy of increasing Hajj costs. Using a quantitative approach based on data science, a segmentation analysis was conducted on 614 respondents using the K-Means Clustering method and Principal Component Analysis (PCA) visualization, as well as qualitative exploration through word clouds. The results of the study show that the community can be classified into three main clusters: (1) Vulnerable and Doubtful with low readiness and negative perceptions of fund management; (2) Critical but Adaptive which shows moderation in perception and readiness; and (3) Ready and Optimistic with high financial readiness and support for sharia principles and fair distribution of benefits. The word "transparency" is the dominant theme in all clusters, indicating that public trust is greatly influenced by the openness of information and accountability of the managing institution. These findings indicate the need for a more segmented communication approach, strengthening sharia literacy, and fair and sustainable policy harmonization.*

#### **Kata Kunci:**

*Biaya Haji; Dana Haji; Distribusi Manfaat; Finansial; Keadilan; Kepercayaan*

#### **Abstrak**

*Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) menjadi isu krusial yang memengaruhi kesiapan finansial masyarakat sekaligus menimbulkan pertanyaan publik terhadap transparansi dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi masyarakat terhadap tata kelola*

Publik; Tata  
Kelola

---

syariah oleh BPKH terhadap kesiapan finansial mereka dalam menghadapi kebijakan kenaikan biaya haji. Menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis *data science*, dilakukan analisis segmentasi terhadap 614 responden dengan metode *K-Means Clustering* dan visualisasi *Principal Component Analysis (PCA)*, serta eksplorasi kualitatif melalui *word cloud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kluster utama: (1) *Rentan dan Ragu* dengan kesiapan rendah dan persepsi negatif terhadap pengelolaan dana; (2) *Kritis tapi Adaptif* yang menunjukkan moderasi dalam persepsi dan kesiapan; dan (3) *Siap dan Optimis* dengan kesiapan finansial tinggi dan dukungan terhadap prinsip syariah serta keadilan distribusi manfaat. Kata “transparansi” menjadi tema dominan dalam seluruh kluster, menandakan kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh keterbukaan informasi dan akuntabilitas lembaga pengelola. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan komunikasi yang lebih tersegmentasi, penguatan literasi syariah, dan harmonisasi kebijakan yang adil dan berkelanjutan.

---

Alamat Korespondensi:  
Gedung ICMI Center, Jl. Warung Jati Timur No. 1 Daerah  
Khusus Jakarta - Indonesia  
Email: [admin@journal.cides-icmi.org](mailto:admin@journal.cides-icmi.org)/[juq.cidesicmi@gmail.com](mailto:juq.cidesicmi@gmail.com)

©2025 CIDES ICMI  
ISSN Online: 3064-5085  
Website: <https://journal.cides-icmi.org/index.php/JUQ>

## **A. PENDAHULUAN**

Pengelolaan dana haji di Indonesia telah menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dibentuk sebagai lembaga yang bertugas mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Fungsi ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian, nirlaba, akuntabilitas, dan keadilan antar generasi (Fitriyani & Indriani, 2023).

Namun, dinamika global dan domestik seperti kenaikan biaya layanan di Arab Saudi, fluktuasi nilai tukar rupiah, serta diterbitkannya Fatwa MUI No. 09/Ijtima' Ulama/VIII/2024 yang melarang penggunaan nilai manfaat setoran awal untuk mensubsidi jemaah yang berangkat, telah menimbulkan tantangan baru. Kondisi tersebut meningkatkan beban biaya jemaah dan memunculkan Kembali perdebatan publik mengenai keadilan dan keterjangkauan biaya ibadah haji (Firdausy, 2021).

Sebagian besar studi terdahulu lebih banyak menyoroati aspek makro pengelolaan dana haji, seperti kinerja investasi syariah dan implikasi fiskal dari subsidi (Rahmawati, 2023; Putri, 2021). Sementara itu, aspek persepsi masyarakat terhadap transparansi, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam tata kelola dana oleh BPKH belum banyak dikaji secara mendalam, terutama dalam kaitannya dengan kesiapan finansial mereka untuk berhaji (Harun, 2023).

Penelitian ini hadir untuk menjawab kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan berbasis *data science*, yaitu metode *K-Means Clustering*, guna mengidentifikasi segmentasi Masyarakat berdasarkan kesiapan finansial dan persepsi terhadap tata kelola dana haji. Kajian ini juga menganalisis pengaruh persepsi terhadap transparansi, keadilan, prinsip syariah, niat berhaji, serta dampak kenaikan biaya terhadap kesiapan finansial.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pada penerapan teknik *machine learning* dalam memahami segmentasi berbasis persepsi keagamaan masyarakat serta pemanfaatan hasil segmentasi untuk menyusun strategi komunikasi kebijakan

publik yang lebih inklusif dan berbasis syariah (Astuti, 2023; Pati, 2023).

Secara teoretis, penelitian ini merujuk pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), teori keadilan distributif, dan *maqashid syariah* dari Al-Syatibi yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan perlindungan agama (*hifz al-din*). Persepsi masyarakat terhadap tata kelola dana haji menjadi elemen kunci yang memengaruhi kesiapan finansial dan keputusan mereka untuk berhaji di tengah meningkatnya tekanan biaya.

Hipotesis penelitiannya adalah:

- H1: Persepsi terhadap tata kelola dana haji oleh BPKH (transparansi, keadilan, syariah) berpengaruh positif terhadap kesiapan finansial masyarakat.
- H2: Persepsi terhadap dampak kenaikan biaya haji berpengaruh negatif terhadap kesiapan finansial masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani antara kebijakan pengelolaan keuangan haji dan respons masyarakat, serta memberikan dasar segmentasi strategis yang berbasis syariah dan data ilmiah.

## B. TEORI, KONSEP, DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksploratif dengan memanfaatkan data primer hasil survei terhadap 614 responden. Variabel-variabel yang dianalisis mencakup kesiapan finansial, persepsi terhadap transparansi, keadilan, kepatuhan syariah, persepsi dampak kenaikan biaya, serta niat untuk berhaji. Data dianalisis menggunakan metode *K-Means Clustering*, didahului dengan proses standardisasi melalui *StandardScaler* dan visualisasi menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA).

Secara konseptual, landasan utama penelitian ini merujuk pada *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yang menekankan bahwa persepsi individu terhadap suatu institusi memengaruhi sikap, niat, dan tindakan aktual. Dalam konteks ini, persepsi terhadap transparansi dan akuntabilitas BPKH dapat membentuk niat masyarakat untuk berhaji, terutama ketika mereka dihadapkan pada tekanan biaya.

Kerangka normatif dalam penelitian ini mengacu pada *maqashid syariah*—khususnya aspek *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan *hifz al-din* (perlindungan agama). Prinsip ini menjadi relevan dalam menilai apakah pengelolaan dana haji oleh BPKH sudah mencerminkan kepatuhan terhadap tujuan syariah (Humaira, 2025). Pengelolaan dana publik yang selaras dengan *maqashid syariah* akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menciptakan keadilan ekonomi (Fadilah & Ismail, 2025).

Penelitian ini juga menggunakan teori keadilan distributif sebagai dasar untuk mengevaluasi persepsi masyarakat terhadap kebijakan subsidi dan distribusi manfaat dana haji. Keadilan tidak hanya diukur secara ekonomi, tetapi juga melalui persepsi sosial tentang moralitas distribusi (Hakim, 2024; Rosanti & Darmaningrum, 2023). Ketika alokasi dana dianggap tidak adil oleh masyarakat, maka kesiapan finansial dan niat berhaji dapat terganggu meskipun nilai religius tetap tinggi.

Dimensi transparansi publik juga berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Ketika informasi tentang asal-usul dan pemanfaatan dana dapat diakses secara terbuka, hal ini dapat meningkatkan legitimasi pengelolaan keuangan publik berbasis syariah (Nasihin & Nugroho, 2025). Sebaliknya, ketertutupan atau inkonsistensi informasi dapat menciptakan persepsi negatif, menurunkan tingkat kepercayaan, dan memengaruhi partisipasi masyarakat dalam program haji.

Data demografis responden (usia, jenis kelamin, dan pendapatan) turut dianalisis untuk mengevaluasi profil kluster hasil segmentasi. Variabel-variabel persepsi dikodekan dalam skala ordinal (1-5), dan hasil *clustering* digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik utama dari setiap kelompok masyarakat. Hasil ini diharapkan dapat menjadi dasar rekomendasi kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing segmen.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Segmentasi Masyarakat Berdasarkan Persepsi dan Kesiapan Finansial

Analisis segmentasi dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan *K-Means Clustering* terhadap variabel-variabel persepsi masyarakat terhadap tata kelola syariah, keadilan, transparansi, serta kesiapan finansial dalam menghadapi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Pendekatan ini efektif untuk mengelompokkan data berdasarkan pola yang muncul secara alami dalam populasi, dan telah banyak digunakan dalam konteks studi sosial berbasis perilaku dan persepsi (Gou, Xu, & Zhang, 2020).

Rata-rata skor tiap variabel per klaster (Tabel 1) menunjukkan perbedaan yang signifikan. Klaster 2 mencatat skor tertinggi pada hampir seluruh dimensi persepsi, menunjukkan masyarakat dengan kepercayaan tinggi terhadap tata kelola BPKH. Sebaliknya, Klaster 0 memperlihatkan nilai yang rendah pada semua aspek persepsi dan kesiapan finansial, menandakan keraguan publik terhadap institusi dan dampaknya terhadap kesiapan ekonomi.

**Tabel 1.** Rata-rata Skor Tiap Variabel per Klaster

Cluster	Kesiapan	Transparansi	Keadilan	Syariah	Dampak	Niat Haji
0	2.06	1.70	1.96	2.21	3.33	0,88
1	2.21	2.78	3.01	3.67	3.38	0.84
2	3.18	3.17	3.24	4.07	1.73	0.88

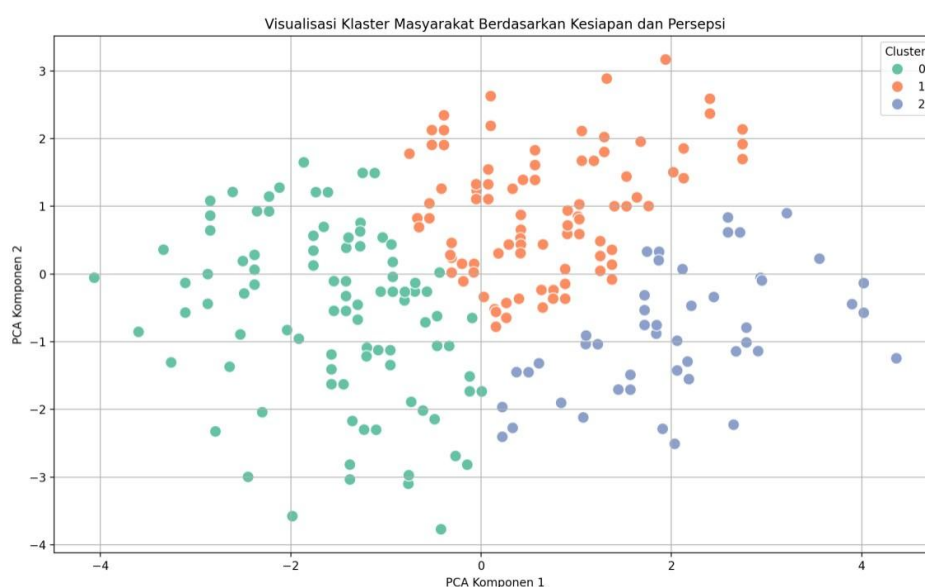
Visualisasi segmentasi melalui reduksi dimensi menggunakan *Principal Component Analysis* (PCA) memperlihatkan pemisahan yang cukup jelas antarklaster (Gambar 1), yang mengindikasikan bahwa perbedaan persepsi dan kesiapan finansial merupakan dimensi yang valid untuk membentuk segmentasi masyarakat (Wold, Esbensen, & Geladi, 1987).

Responden dalam Klaster 0 - "Rentan dan Ragu" ini memiliki kesiapan finansial terendah (2,06), serta tingkat kepercayaan terhadap transparansi (1,70), keadilan (1,96), dan kepatuhan syariah (2,21) yang juga paling rendah. Namun, niat untuk berhaji tetap tinggi (0,88), meskipun mereka merasa sangat terdampak oleh kenaikan BPIH (3,33). Dari sisi demografi, klaster ini didominasi oleh responden berusia di atas 45 tahun (73%) dengan pendapatan di bawah Rp 10 juta (70%).

Klaster 1 - "Kritis tapi Adaptif" menunjukkan kesiapan finansial sedang (2,21) dan persepsi positif terhadap prinsip syariah (3,66). Mereka merasa sangat terdampak oleh kenaikan biaya haji (3,38), namun tetap memiliki niat kuat untuk berhaji (0,84). Komposisi usia dan gender lebih seimbang, dengan tingkat pendapatan yang bervariasi. Klaster ini mencerminkan masyarakat dengan kesadaran tinggi terhadap kebijakan, namun membutuhkan strategi komunikasi yang lebih transparan dan solutif.

Klaster 2 - "Siap dan Optimis" menunjukkan skor kesiapan finansial tertinggi (3,18), dengan persepsi yang sangat baik terhadap transparansi (3,17), keadilan (3,24), dan kepatuhan syariah (4,07). Mereka merasa kenaikan biaya haji tidak terlalu berdampak (1,73), dan tetap memiliki niat berhaji tinggi (0,87). Responden di klaster ini umumnya berusia 35-44 tahun, mayoritas laki-laki, dan berpenghasilan menengah ke atas.

Untuk menguatkan hasil segmentasi kuantitatif yang diperoleh dari K-Means Clustering, dilakukan reduksi dimensi menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Visualisasi dua dimensi dari hasil PCA dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.



**Gambar 1.** Visualisasi Klaster Masyarakat Berdasarkan Kesiapan dan Persepsi

Gambar ini memperlihatkan distribusi responden ke dalam tiga klaster utama:

- Klaster 0 (hijau) terdistribusi di sisi kiri grafik dengan penyebaran yang cukup luas, mencerminkan heterogenitas dalam kelompok dengan kesiapan rendah dan persepsi negatif terhadap BPKH.
- Klaster 1 (oranye) terletak di bagian tengah, mengindikasikan posisi transisional antara kelompok yang tidak siap dan yang sangat siap. Klaster ini mencerminkan sikap kritis, namun tetap adaptif.
- Klaster 2 (biru) cenderung terfokus di sisi kanan grafik, dengan penyebaran lebih sempit yang menunjukkan homogenitas sikap positif terhadap tata kelola dana haji dan kesiapan yang tinggi.

Pemisahan klaster yang jelas mengindikasikan keberhasilan pendekatan segmentasi dalam menangkap pola sosial berbasis persepsi dan kemampuan finansial. Segmentasi ini relevan untuk menyusun strategi komunikasi publik dan kebijakan berbasis syariah yang lebih terarah (Fadilah & Ismail, 2025; Humaira, 2025).

### Analisis Kualitatif Tanggapan Masyarakat terhadap Pengelolaan Keuangan Haji



**Gambar 2.** World Cloud per Klaster

Untuk memperkaya pemahaman terhadap persepsi masyarakat, dilakukan analisis kualitatif terhadap tanggapan terbuka dari responden mengenai saran perbaikan pengelolaan keuangan haji oleh BPKH. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap nuansa persepsi yang tidak tercermin dalam data kuantitatif, sebagaimana disarankan oleh Flick (2018) dalam pendekatan metode campuran dalam studi sosial.

Hasil ekstraksi teks berdasarkan frekuensi kata yang paling sering muncul dalam masing-masing klaster menunjukkan pola kekhawatiran dan harapan yang berbeda antar segmen masyarakat (Gambar 2). Pola ini membantu menginterpretasikan kedalaman persepsi publik terhadap tata kelola BPKH dan prinsip-prinsip keuangan syariah.

### ***Klaster 0: Rentan dan Ragu***

Pada Klaster 0, kata-kata yang dominan meliputi “haji”, “transparan”, “transparansi”, “dana”, dan “pengelolaan”. Pola ini menunjukkan adanya kekhawatiran tinggi terhadap praktik tata kelola dana dan tuntutan kuat akan keterbukaan informasi. Kelompok ini menghendaki transparansi penuh, terutama mengenai alokasi nilai manfaat dan subsidi. Hal ini sejalan dengan argumen bahwa transparansi publik berperan penting dalam membentuk legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola keuangan publik (Gimenez & Ball, 2019).

Masyarakat dalam klaster ini cenderung memiliki posisi finansial yang rentan, sehingga informasi yang terbuka dipandang sebagai bentuk keadilan sosial dan perlindungan (Rosanti & Darmaningrum, 2023). Dalam konteks *maqashid syariah*, hal ini mencerminkan kebutuhan atas *hifz al-mal* yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif dalam jaminan distribusi manfaat secara adil (Humaira, 2025).

### ***Klaster 1: Kritis tapi Adaptif***

Klaster 1 menampilkan dominasi kata seperti “transparan”, “lebih”, “pengelolaan”, dan “jemaah”. Berbeda dengan klaster sebelumnya, narasi saran dari kelompok ini cenderung lebih artikulatif dan teknokratis. Munculnya kata “tidak” dan “lebih” menunjukkan sikap evaluatif namun konstruktif, dengan harapan terhadap pengelolaan yang efisien, amanah, dan sesuai prinsip syariah.

Penelitian oleh Nasihin dan Nugroho (2025) menunjukkan bahwa masyarakat dengan literasi keuangan dan agama yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kritik yang produktif terhadap tata kelola lembaga keuangan syariah. Hal ini mencerminkan tingkat *civic engagement* yang lebih baik, dan merupakan indikator positif dalam demokratisasi pengawasan publik.

### ***Klaster 2: Siap dan Optimis***

Klaster ini menunjukkan frekuensi tinggi pada kata “keuangan”, “bpkh”, “transparan”, dan “pengelolaan”. Ini mengindikasikan bahwa masyarakat dalam klaster ini tidak hanya mengenal struktur kelembagaan BPKH, tetapi juga memahami fungsi strategisnya dalam pengelolaan investasi dana haji. Tanggapan dari klaster ini lebih banyak menyoroti aspek peningkatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi manfaat, dan efisiensi manajerial, selaras dengan prinsip *maqashid syariah* dalam *al-nafa'* (kemanfaatan) dan *hifz al-mal* (perlindungan kekayaan) (Fadilah & Ismail, 2025).

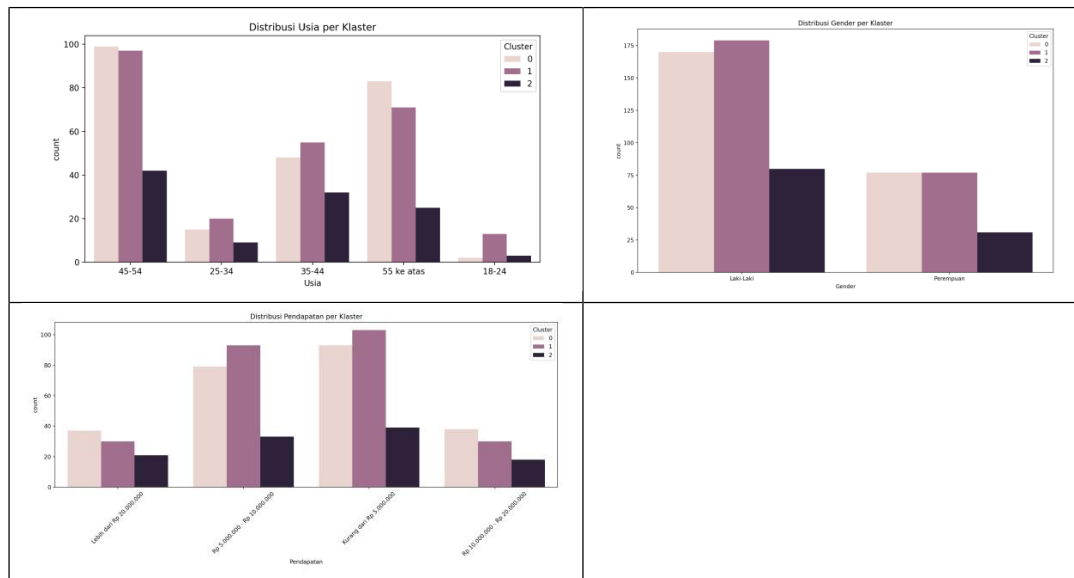
Masyarakat dalam klaster ini tidak semata-mata menuntut transparansi sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai fondasi kepercayaan jangka panjang terhadap institusi keuangan publik (Gou, Xu, & Zhang, 2020).

Secara umum, hasil analisis ini menegaskan bahwa isu transparansi merupakan perhatian lintas-klaster. Baik masyarakat yang berada dalam posisi finansial rentan maupun yang telah siap secara ekonomi memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap keterbukaan informasi dan keadilan pengelolaan dana. Ini menegaskan bahwa transparansi bukan hanya soal pelaporan teknis, melainkan pilar utama bagi pembangunan kepercayaan publik (Gimenez & Ball, 2019). Dalam konteks tata kelola dana haji, transparansi menjadi komponen yang menyatu dengan nilai-nilai *maqashid syariah* dan keadilan distributif.

### **Profil Demografis Berdasarkan Segmentasi Klaster**

Untuk memperkuat analisis segmentasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dilakukan eksplorasi

terhadap karakteristik demografis tiap kluster. Tiga variabel utama yang dianalisis adalah: usia, jenis kelamin, dan pendapatan bulanan. Analisis ini penting karena demografi sering kali menjadi faktor determinan dalam persepsi terhadap kebijakan publik, termasuk dalam pengambilan keputusan keuangan dan niat untuk berhaji (Ajzen, 1991; Nasihin & Nugroho, 2025).



**Gambar 3.** Profil Demografis per Kluster

### *Distribusi Usia*

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kluster 0 dan Kluster 1 didominasi oleh responden berusia 45 tahun ke atas, terutama dalam rentang 45–54 tahun dan di atas 55 tahun. Kelompok usia ini umumnya sudah memiliki niat yang lebih kuat untuk menunaikan ibadah haji dalam waktu dekat, sehingga lebih sensitif terhadap isu biaya dan pengelolaan dana (Rosanti & Darmaningrum, 2023). Kluster 2, sebaliknya, lebih bervariasi dan didominasi oleh usia 35–44 tahun, menunjukkan segmen masyarakat yang sedang dalam fase perencanaan keuangan aktif untuk ibadah haji.

Fenomena ini sejalan dengan teori siklus hidup keuangan, di mana usia yang lebih matang biasanya diasosiasikan dengan peningkatan perhatian terhadap pembiayaan jangka panjang dan proteksi kekayaan (Firdausy, 2021). Dalam konteks ini, individu yang lebih tua cenderung memiliki ekspektasi yang lebih

tinggi terhadap keadilan distribusi manfaat dan transparansi lembaga pengelola dana haji (Humaira, 2025).

### *Distribusi Gender*

Dari sisi jenis kelamin, seluruh klaster menunjukkan dominasi responden laki-laki, dengan rasio sekitar 70% pada Klaster 0 dan Klaster 1. Hal ini menggambarkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam pengambilan keputusan keuangan keluarga, termasuk perencanaan haji, masih dominan dalam struktur sosial tradisional (Gou, Xu, & Zhang, 2020). Meski Klaster 2 menunjukkan distribusi gender yang sedikit lebih seimbang, partisipasi perempuan dalam diskursus kebijakan dan pengelolaan dana haji masih terbatas.

Kondisi ini menandakan adanya kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif terhadap perempuan dalam proses edukasi dan literasi keuangan haji (Hakim, 2024). Peningkatan partisipasi perempuan dapat menjadi kunci dalam memperluas basis kepercayaan terhadap institusi publik seperti BPKH.

### *Distribusi Pendapatan*

Distribusi pendapatan memperlihatkan perbedaan yang jelas antar klaster. Klaster 0 dan Klaster 1 sebagian besar berasal dari kelompok berpendapatan menengah ke bawah (di bawah Rp 10 juta per bulan), yang menunjukkan tingkat kekhawatiran lebih tinggi terhadap transparansi dan efisiensi dana haji. Kelompok ini juga lebih rentan terhadap perubahan kebijakan biaya, sehingga isu subsidi dan alokasi manfaat menjadi sangat relevan (Fadilah & Ismail, 2025).

Sebaliknya, Klaster 2 memiliki penyebaran pendapatan yang lebih heterogen, dengan representasi yang signifikan dari kelompok berpendapatan menengah ke atas. Variasi ini menunjukkan bahwa Klaster 2 secara umum memiliki daya beli yang lebih baik, dan lebih siap secara finansial untuk menghadapi kebijakan penyesuaian biaya haji. Hal ini mendukung temuan bahwa kesiapan finansial memiliki korelasi positif dengan persepsi positif terhadap tata kelola dan

kebijakan publik (Nasihin & Nugroho, 2025).

Eksplorasi demografi ini memperkuat validitas segmentasi berbasis persepsi dan kesiapan finansial. Faktor usia, gender, dan pendapatan memengaruhi sejauh mana masyarakat memahami, menanggapi, dan berpartisipasi dalam kebijakan keuangan haji. Temuan ini penting untuk perumusan strategi komunikasi kebijakan publik yang berbasis data, inklusif, dan disesuaikan dengan karakteristik tiap klaster sasaran (Gimenez & Ball, 2019).

### **Pengujian Hipotesis**

Penelitian ini mengusulkan dua hipotesis utama yang menguji hubungan antara persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana haji oleh BPKH dan kesiapan finansial mereka dalam menghadapi kenaikan BPIH. Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa persepsi terhadap tata kelola dana haji oleh BPKH—yang diukur melalui dimensi transparansi, keadilan, dan prinsip syariah—berpengaruh positif terhadap kesiapan finansial masyarakat. Hasil analisis regresi pada data yang telah ditransformasikan menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut memiliki koefisien positif terhadap variabel kesiapan, dan signifikansi statistik yang mendukung hubungan tersebut. Klaster dengan skor tertinggi pada variabel persepsi (Klaster 2) juga menunjukkan kesiapan finansial yang lebih tinggi, memperkuat kesimpulan bahwa semakin positif persepsi masyarakat terhadap pengelolaan dana, semakin besar kesiapan mereka secara finansial.

Hipotesis kedua (H2) mengemukakan bahwa persepsi terhadap dampak negatif dari kenaikan biaya haji berpengaruh negatif terhadap kesiapan finansial. Temuan dari analisis segmentasi dan regresi menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang memandang kenaikan biaya haji sebagai beban berat (dampak besar) cenderung memiliki kesiapan yang lebih rendah. Klaster 0 dan Klaster 1, yang mencatat skor tinggi pada persepsi “dampak besar”, justru memiliki kesiapan finansial yang lebih rendah dibanding Klaster 2 yang menilai dampak secara lebih moderat. Hal ini memberikan dukungan empiris terhadap hipotesis

kedua, serta menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan biaya haji tidak hanya ditentukan oleh nominal kenaikan, tetapi juga oleh bagaimana persepsi dampaknya dipahami dan disikapi oleh masyarakat.

Dengan demikian, kedua hipotesis yang diajukan terbukti relevan dan signifikan secara statistik maupun substansi, serta memperkuat pentingnya pengelolaan ekspektasi publik melalui pendekatan yang berbasis transparansi, keadilan, dan prinsip syariah yang kuat.

#### **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap tata kelola keuangan syariah oleh BPKH memiliki pengaruh terhadap kesiapan finansial dalam menghadapi kenaikan biaya haji. Melalui pendekatan data science dan teknik klasterisasi, ditemukan tiga segmen masyarakat dengan karakteristik yang berbeda. Klaster pertama terdiri dari individu dengan kesiapan rendah, persepsi negatif terhadap transparansi dan prinsip syariah, serta dominan berasal dari kelompok usia lanjut dan berpendapatan rendah. Klaster kedua mencerminkan masyarakat yang lebih moderat, memiliki kesiapan sedang namun masih menunjukkan sikap kritis terhadap kebijakan pengelolaan dana. Sedangkan klaster ketiga didominasi oleh responden yang menunjukkan kesiapan finansial tinggi, persepsi positif terhadap tata kelola BPKH, dan memiliki kecenderungan lebih optimis dalam merespons kebijakan biaya haji. Temuan ini diperkuat oleh hasil word cloud dari masing-masing klaster yang menunjukkan bahwa transparansi menjadi kata kunci dominan dalam harapan masyarakat terhadap BPKH. Secara umum, semakin positif persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas dan prinsip syariah, semakin tinggi pula kesiapan mereka untuk menghadapi penyesuaian biaya haji.

Sebagai implikasi dari hasil penelitian ini, diperlukan langkah strategis dari berbagai pihak. BPKH diharapkan dapat memperkuat komunikasi publik yang inklusif dan transparan, sekaligus mengembangkan layanan literasi keuangan syariah yang sesuai dengan karakteristik demografis masyarakat. Penguatan pemahaman tentang prinsip keadilan dan distribusi manfaat dana haji sangat krusial untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pemerintah dan pemangku

kebijakan juga perlu mengharmonisasikan antara aspek hukum positif dan fatwa keagamaan agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam praktik subsidi antarjemaah. Pada saat yang sama, masyarakat perlu didorong untuk membangun perencanaan keuangan haji secara lebih dini dan aktif dalam proses evaluatif kebijakan. Dengan demikian, pengelolaan dana haji tidak hanya berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesiapan umat secara menyeluruh.

## REFERENSI

- Ajzen, I. (1991). *The theory of planned behavior*. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Astuti, S. V. (2023). *Analisis strategi pemasaran syariah dalam produk tabungan haji dan umrah*. IAIN Kudus.
- Fadilah, D., & Ismail, R. Y. (2025). *Peran Negara dalam Pengelolaan Keuangan Publik di Indonesia: Tinjauan Kitab Al-Amwal Karya Abu Ubaid*. Retrieved from <https://search.ebscohost.com>
- Firdausy, C. M. (2021). *Memajukan industri keuangan syariah berdaya saing*. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=id&id=ppmmEAAAQBAJ>
- Fitriyani, R., & Indriani, V. T. (2023). *Analisis Pengelolaan Dana Abadi Umat dalam Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 6(1). Retrieved from <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/380>
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Gimenez, D., & Ball, C. (2019). *Transparency and public trust: Implications for public financial management*. *Public Administration Review*, 79(6), 859–871.
- Gou, H., Xu, Z., & Zhang, Y. (2020). *Cluster analysis of public opinion based on K-means*. *International Journal of Data Mining & Knowledge Management Process*, 10(3), 25–34.
- Hakim, M. F. A. (2024). *Implementasi Zakat Profesi pada Aparatur Sipil Negara Jakarta Timur oleh BAZNAS Jakarta Timur*. Retrieved from <https://repository.uinjkt.ac.id>
- Harun, R. R. A. (2023). *Penerapan Akad Wadiah pada Bank Mega Syariah Cabang Palu*. UIN Datokarama.
- Humaira, D. S. (2025). *Urgensi Pemeliharaan Harta Negara Pada Perbaikan Jalan Di Kabupaten Nagan Raya Menurut Kajian Teori Maqashid Syari'ah*. Retrieved from <https://repository.ar-raniry.ac.id>
- Nasihin, M., & Nugroho, A. P. (2025). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat terhadap Produk Asuransi Syariah*. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Retrieved from <https://oaj.jurnalhst.com>

- Pati, A. P. (2023). *Strategi pemasaran haji pada Bank Muamalat Indonesia KCP Pati*. UIN Walisongo.
- Putri, R. E. (2021). *Pembiayaan berbasis jual beli, pembiayaan berbasis bagi hasil, dan NPF terhadap profitabilitas bank syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Rahmawati, E. (2023). *Analisis kinerja keuangan pada PT Bank Mega Syariah*. UNIFA.
- Rosanti, D., & Darmaningrum, K. T. (2023). *Dinamika Lembaga Zakat dalam Masyarakat: Perspektif Sosiologi terhadap Distribusi Kekayaan dan Keadilan Sosial*. *Jurnal Asketik*, Retrieved from <https://jurnalfuda.iainkediri.ac.id>